

May 2007

Isu Privatisasi Konflik: Penggunaan Perusahaan Militer atau Keamanan dalam Konflik Sierra-Leone

Senia Febrica

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UI, seniafebrica@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global>

Recommended Citation

Febrica, Senia (2007) "Isu Privatisasi Konflik: Penggunaan Perusahaan Militer atau Keamanan dalam Konflik Sierra-Leone," *Global: Jurnal Politik Internasional*: Vol. 9 : No. 1 , Article 3.

DOI: 10.7454/global.v9i1.257

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/global/vol9/iss1/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Global: Jurnal Politik Internasional by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Isu Privatisasi Konflik: Penggunaan Perusahaan Militer atau Keamanan dalam Konflik Sierra-Leone

SENIA FEBRICA

Abstract

This article tries to elaborate the trend of conflict privatization in the post cold war world. It identifies and analyzes the driving factors for the usage of private armies in Sierra Leone. As a weak state, the military incapacity of the state and the reduction of external intervention, creates great difficulties for the state in solving its internal conflict, making the use of private armies as a favorable option in resolving conflict.

Keywords: Conflict Privatization, Private Security Company, Private Military Company, Security Market

*"War had ceased to be an art and become a trade."¹
(Clausewitz)*

PENGANTAR

Fenomena privatisasi konflik berkembang dengan pesat sejak awal tahun 1990-an. Ketika Perang Dingin berakhir, akibat yang ditimbulkan adalah penurunan peranan militer secara global, yang berdampak pada pemberhentian 6 juta personel militer.² Sementara itu, terjadi peningkatan jumlah konflik di dunia. Dalam kondisi ini, negara-negara yang tergolong *great powers* menunjukkan keengganan untuk melibatkan diri dalam konflik-konflik tersebut, sehingga muncullah *gap* dalam "market of security" yang segera diisi oleh perusahaan-perusahaan militer atau keamanan swasta. Pada saat negara-negara tidak memiliki kapabilitas militer yang memadai untuk mengatasi konflik internal

maka aktor-aktor swasta penyedia jasa keamanan ini pun menjadi salah satu pilihan utama.

Negara dengan kapasitas militer lemah - seperti Sierra Leone - melakukan privatisasi konflik saat kekuatan bersenjata tidak mampu mempertahankan tatanan yang ada dan tingkat kekerasan mengalami peningkatan, baik karena aktivitas dari kelompok paramiliter, *warlords*, maupun kelompok pemberontak. Dalam kondisi dimana terdapat keterbatasan kapasitas negara untuk memberikan perlindungan kepada rakyat sipil, mengontrol wilayah-wilayah negara, melindungi fasilitas serta daerah yang vital bagi negara (seperti daerah pertambangan maupun ibukota pemerintahan), serta rendahnya intervensi negara *major*

power menjadikan penggunaan *PSC* (*Private Security Company*) atau *PMC* (*Private Military Company*) opsi yang patut dipertimbangkan. Tulisan ini secara khusus akan membahas faktor-faktor yang mendorong negara dengan kapasitas militer lemah untuk mengambil kebijakan privatisasi konflik, dengan studi kasus Sierra Leone.

KONSEP PRIVATISASI KONFLIK

Pertumbuhan *PSCs* atau *PMCs* telah membuka potensi pasar yang mendorong terjadinya privatisasi konflik. Dalam mendefinisikan *Private Military Companies* (*PMCs*), David Shearer menuliskan bahwa *PMCs* merupakan perusahaan yang menawarkan keahlian militer yang semula dikontrol oleh pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat kapabilitas kekuatan militer kliennya agar dapat berfungsi secara lebih baik dalam perang atau untuk menangkal konflik dengan lebih efektif. *PMCs* berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya dalam area industri keamanan karena didesain untuk memberikan dampak strategis bagi kondisi keamanan dan politik dari negara lemah ketika menghadapi ancaman militer yang signifikan.³ Berbeda dengan *PMCs*, menurut Shearer, *Private Security Companies* (*PSCs*) merupakan perusahaan yang dalam memberikan jasanya membatasi pada area-area tertentu, terutama pada daerah di mana investasi asing itu berada. Dalam perkembangan privatisasi konflik, *PSCs* atau *PMCs* menjadi lebih sulit untuk dibedakan karena telah terjadi perluasan tugas dari *PSCs*. Jasa yang ditawarkan oleh *PSCs* tidak hanya terbatas pada perlindungan instalasi-instalasi penting, tetapi juga meliputi berbagai dukungan keamanan eksternal dan internal; termasuk

didalamnya operasi khusus seperti *counter-terrorism* dan *counter-insurgency*.¹

Konsep privatisasi konflik yang dipergunakan dalam tulisan ini merujuk pada keputusan-keputusan untuk memindahkan pembiayaan jasa keamanan kepada entitas swasta.⁵ Dalam upaya menganalisis bahwa keterlibatan *PSCs* atau *PMCs* menjadi jauh lebih penting pada masa sekarang dibandingkan pada masa lampau, P.W. Singer menjelaskan bahwa terdapat 3 dinamika keamanan internasional yang mempengaruhi perkembangan privatisasi sektor keamanan secara lebih pesat, yaitu: ⁶ Pertama, adanya kesenjangan yang terjadi dalam "market of security". Kesenjangan ini terbentuk karena munculnya gangguan pada permintaan serta penawaran terhadap kekuatan militer pasca Perang Dingin. Demobilisasi militer yang terjadi menyebabkan tentara-tentara yang terkena dampak dari pengurangan jumlah militer membentuk perusahaan-perusahaan militer. Kedua, adanya transformasi hakekat perang. Transformasi ini terjadi baik pada konflik berintensitas tinggi maupun konflik berintensitas rendah. Pada konflik berintensitas tinggi, peralatan berteknologi tinggi yang pengoperasiannya memerlukan tenaga-tenaga ahli semakin meningkatkan permintaan terhadap entitas swasta penyedia jasa militer. Sedangkan, pada konflik berintensitas rendah tanpa adanya monopoli kekerasan oleh pemerintah dan semakin terdiversifikasinya instrumen perang yang tersedia bagi berbagai aktor menjadikan perusahaan-perusahaan militer semakin diperlukan. Alasan ketiga yang diajukan oleh Singer adalah perkembangan norma privatisasi. Gerakan privatisasi yang

berkembang selama beberapa dekade terakhir ini telah mendorong terjadinya privatisasi dalam berbagai fungsi yang sebelumnya merupakan domain pemerintah, termasuk bidang militer.

Dalam menjelaskan mengenai penyebab privatisasi konflik tidak cukup jika hanya melihat dari politik internasional, karena struktur domestik turut berpengaruh dalam kebijakan yang diambil. Menurut Peter Gourevitch dalam tulisan "*Second Image Reversed*" tipe rezim dan pola koalisi merupakan variabel struktur domestik yang paling sering digunakan dalam menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri.⁷

PERKEMBANGAN PRIVATISASI KONFLIK DI SIERRA LEONE

Perkembangan norma privatisasi menjadi faktor penting yang mendorong penggunaan PSC dan PMC secara global. Di negara-negara yang terletak di kawasan Afrika privatisasi di bidang keamanan berlangsung dalam waktu yang lama karena sejumlah besar negara memiliki kebutuhan keamanan dan militer untuk menjaga stabilitas internal negaranya namun kapabilitas yang dimiliki jauh dari memadai. Oleh karena itu negara-negara dengan kapasitas lemah di Afrika ini mengambil kebijakan untuk menggunakan jasa dari entitas keamanan swasta. Secara historis tentara bayaran telah dipergunakan di Afrika sejak 150 tahun yang lalu. Tentara bayaran ini pada awalnya menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan dagang yang berdiri pada masa kolonialisme Afrika, seperti perusahaan dagang Inggris *the United African Company* dan perusahaan Perancis yaitu *Compagnie Francaise Quest*

Africa Occidentale dan Societe Commerciale Quest Africaine.⁸

Dalam perkembangannya tentara-tentara bayaran ini kemudian dipergunakan sebagai unit-unit pertempuran pasca kemerdekaan negara-negara jajahan. Kelompok-kelompok tentara bayaran ini seringkali memihak kelompok pemberontak, pemimpin politik yang oportunistis maupun kelompok bisnis dalam menentang pemerintahan yang berkuasa. Akan tetapi karakteristik dari PMC atau PSC sekarang ini dinilai oleh para pengamat keamanan telah mengalami perubahan yang dapat berdampak pada kestabilan Afrika. Demobilisasi militer yang terjadi pasca Perang Dingin menyebabkan sebagian besar tentara yang telah di-demobilisasi memasuki pasar keamanan. Mantan anggota tentara tersebut dinilai memiliki keahlian dan profesionalisme kerja, seperti mantan anggota *United States Delta Force*, *Soviet Union Spetnaz*, *Britain Gurkha*, dan *South Africa's Reconnaissance Commando* yang kemudian bergabung ke dalam perusahaan-perusahaan militer atau keamanan swasta.⁹ PMCs/PSCs yang terbentuk merupakan sebuah korporasi yang permanen sehingga dinilai dapat meningkatkan profesionalisme militer dari negara yang menjadi kliennya. karena tindakan dari PMCs/PSCs yang tidak profesional akan merusak citra dari korporasi terutama dengan adanya pemberitaan negatif dari media, yang bisa mengurangi kemungkinan pemberian kontrak dari negara-negara kliennya di masa mendatang.

Berkembangnya norma privatisasi dalam sektor keamanan telah mendorong negara-negara Barat untuk memanfaatkan keberadaan PMC atau PSC untuk melakukan pelatihan militer "proxy" di negara-negara yang ada di kawasan Afrika. Keengganan untuk terlibat secara langsung dalam konflik maupun batasan-batasan dari publik menjadikan penggunaan perusahaan militer atau keamanan swasta sebagai alternatif pilihan. Baik pemerintah Inggris maupun Perancis memberikan izin bagi PSC atau PMC untuk menjalankan kontraknya dengan pemerintah negara lain. Pemerintah Inggris memiliki hubungan erat dengan DSL yang telah bekerja untuk PBB, berbagai kedutaan asing, pemerintah negara lain maupun perusahaan-perusahaan multinasional seperti British Petroleum, Shell, Mobil dan De Beers.¹⁰ Military Professional Resources, Inc. (MPRI), yang merupakan PSC atau PMC yang berbasis di Virginia, Amerika Serikat memiliki kontrak kerja dengan negara Afrika, dan pada tahun 1999 Nigeria merupakan negara yang menjadi fokus kerjanya.¹¹

Berakhirnya Perang Dingin telah menyebabkan destabilisasi sejumlah negara Afrika dengan mengubah *balance of power* lokal dan menjadikan kelompok *insurgents* lebih kuat daripada institusi negara. Sebelumnya eksistensi negara *superpower* dinilai memoderatkan potensi konflik karena mempertahankan *status quo* antara pemerintah dan *insurgents* melalui dukungan politik dan materialnya.¹² Dengan berakhirnya tekanan dari atas yang dilakukan oleh kedua *superpower* (Amerika Serikat dan Uni Soviet), maka muncul berbagai ancaman baru seperti konflik etnik maupun konflik internal.¹³ Meningkatnya ancaman dan berkurangnya kapasitas untuk merespon telah menimbulkan kesenjangan yang dapat dipulihkan kembali dengan penggunaan PSCs/PMCs dalam konflik. Salah satu

negara yang mencerminkan kondisi keamanan tersebut adalah Sierra Leone. Privatisasi konflik di Sierra Leone didorong oleh dinamika internasional yang terjadi maupun konteks domestik dari negara tersebut. P.W. Singer melihat bahwa : Pertama, dinamika politik internasional yang terjadi pertama-tama adalah merupakan dampak dari kesenjangan dalam suplai maupun permintaan jasa militer. Kedua, transformasi dari hakekat perang itu sendiri telah menciptakan tuntutan sekaligus kesempatan pasar bagi perusahaan militer dan keamanan. Ketiga, terjadi revolusi privatisasi yang menjadi dasar logika sekaligus legitimasi bagi privatisasi dalam domain negara.¹⁴

Kesenjangan dalam Security Market

Di Sierra Leone, peningkatan kebutuhan keamanan terjadi dengan adanya eskalasi kekerasan setelah kelompok pemberontak RUF (*Revolutionary United Front*) mendapat bantuan persenjataan dari Charles Taylor seorang *warlord* Liberia yang kemudian menjadi presiden Liberia. Pemberian bantuan dari Charles Taylor kepada RUF bertujuan untuk mereduksi kemampuan pemerintah Sierra Leone dalam memberikan bantuan militer kepada *Economic Community of West African States Monitoring Group (ECOMOG)* di Liberia.

Pada bulan Maret 1991, RUF yang telah dipersenjatai melakukan perlawanan terhadap pemerintahan *All Peoples Congress* yang dipimpin oleh President Joseph Momoh. Walaupun pemerintahan Momoh dikudeta oleh kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Kapten Valentine Strasser, pada bulan April 1992, RUF tetap melancarkan serangannya atas

pemerintahan yang berkuasa, serta menolak untuk bernegosiasi. RUF bahkan mengajukan tuntutan penarikan mundur pasukan Nigeria dan Guinea dari wilayah Sierra Leone.

Tabel 1.1 Total Anggota Aktif Militer Sierra-Leone

Tahun	Sierra Leone
1989-1990	3.100
1990-1991	3.150
1991-1992	3.150
1992-1993	6.150
1993-1994	6.150
1994-1995	6.150
1995-1996	6.150
1997-1998	*
1998-1999	♦
1999-2000	3.000
2000-2001	3.000
2001-2002	6.000
2002-2003	13.000-14.000
2003-2004	13.000-14.000
2004-2005	12.000-13.000
2005-2006	12.000-13.000

Keterangan:

*)Detail struktur kekuatan angkatan bersenjata tidak tersedia, karena setelah perang sipil yang terjadi pada bulan Mei sampai dengan Juni 1997.

♦Pasukan nasional Sierra Leone yang pada tahun sebelumnya terbentuk melalui aliansi antara AFRC dan RUF dibubarkan, dan dibentuk kembali Angkatan Bersenjata Nasional dengan jumlah pasukan sekitar 5.000 orang.

Peningkatan kekerasan yang ditimbulkan oleh perang sipil antara pemerintah Sierra Leone dan RUF telah menyebabkan 20.000 korban meninggal dan lebih dari separuh rakyat Sierra Leone mengungsi meninggalkan tempat tinggalnya.¹⁵ Kondisi humaniter di Sierra Leone terus memburuk sejak perang sipil dimulai pada tahun 1991. Terdapat 700.000 *internally displaced peoples*

(IDPs) dan 500.000 pengungsi di luar perbatasan wilayah Sierra Leone.¹⁶

Kondisi keamanan internal yang dipenuhi dengan konflik internal tersebut tidak dapat diatasi oleh pemerintah Sierra Leone oleh karena adanya kendala keterbatasan jumlah personel militer. Sejak tahun 1990 sampai dengan akhir tahun 1992, jumlah tentara yang dimiliki hanya mencapai 3.150 personel. Jumlah ini baru mengalami peningkatan setelah tahun 1993 menjadi 6.150 orang.¹⁷

Kondisi persenjataan yang dimiliki oleh militer Sierra Leone sangat buruk, hanya terdapat sejumlah kecil senjata yang tidak berfungsi dengan baik. Sebagian persenjataan yang dimiliki misalnya 6.000 senapan G-3 yang diterima dari Inggris dan Nigeria pada tahun 1970-an dan 1980-an.¹⁸

Transformasi Hakikat Perang

Transformasi hakikat perang yang terjadi di Sierra Leone ditunjukkan dengan adanya kriminalisasi perang, dan penguatan aktor-aktor non negara dalam perang. Kriminalisasi perang -yang menjadi salah satu aspek transformasi perang- terbentuk karena adanya aktor-aktor yang diuntungkan dengan terjadinya konflik. Dalam konflik Sierra Leone baik angkatan bersenjata negara maupun kelompok pemberontak berupaya untuk mendapatkan keuntungan material dari konflik. Pasukan nasional Sierra Leone mengambil keuntungan dari situasi perang melalui penambangan berlian ilegal dan dengan merampok rakyat sipil.¹⁹ Sementara kelompok pemberontak RUF berupaya untuk mengontrol daerah pertambangan

berlian dan perdagangan berlian melalui pasar gelap.

Perkiraan yang dibuat oleh PBB menyebutkan bahwa Sierra Leone setiap tahunnya dapat memproduksi 2 juta karat dari total produksi dunia sebesar 250 juta karat. Akan tetapi menurut laporan yang dikeluarkan oleh PBB antara tahun 1992-1996 Sierra Leone hanya melaporkan produksi berlian sebesar 200.000 karat. Pada tahun 1997-1998, situasi keamanan di Sierra Leone semakin memburuk, pada saat bersamaan laporan resmi untuk produksi berlian hanya mencapai 36,384 karat.²⁰

Dengan keuntungan yang diperoleh RUF dari penjualan berlian, RUF dapat mendukung 3.500 sampai dengan 5.000 personil pasukannya, komunikasi internal RUF, serta pembelian senjata.²¹ Berlian ilegal ini juga digunakan RUF, sebagai alat tukar dalam proses barter untuk mendapatkan material-material lainnya yang diperlukan selain senjata, seperti obat-obatan dan pangan.

Oleh karena transformasi hakekat konflik yang ditandai dengan kriminalisasi konflik melibatkan pasukan nasional yang turut mencari keuntungan melalui penambangan ilegal ataupun merampok rakyat sipil, dan dengan semakin menguatnya aktor-aktor non negara karena aktivitas kriminal dalam penambangan maupun impor senjata kecil dan ringan ilegal maka untuk menanggulangi kelompok pemberontak, negara menjadikan penggunaan jasa *PMCs/PSCs* sebagai pilihan dalam menangani konflik.

Perkembangan Norma Privatisasi

Secara spesifik penggunaan pasukan non tentara nasional dalam konflik Sierra Leone telah dilakukan sejak tahun 1950-an. Namun, *outsourcing* di bidang militer ini tidak dilakukan oleh negara melainkan oleh perusahaan *Harry Oppenheimer of De Beers*. Melalui praktek-praktek penggunaan perusahaan militer atau keamanan swasta inilah norma privatisasi di dalam domain militer dapat mempengaruhi kehidupan politik domestik negara.

Di Afrika, perusahaan militer atau keamanan swasta tidak hanya dipergunakan oleh aktor negara melainkan juga aktor non-negara seperti perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Afrika. Pemerintah Sierra Leone mempergunakan jasa *PMCs/PSCs* terutama untuk menanggulangi pemberontakan yang dilakukan oleh RUF maupun untuk pengamanan pelabuhan dan daerah penangkapan ikan. Untuk menangani pemberontakan RUF pada tahun 1995, pemerintah Sierra Leone telah menyewa sejumlah PSC atau PMC, antara lain; *J & S Frankllin (Gurkha Security Guards Ltd,)* yang kemudian digantikan oleh *EO (Executive Outcome)* pada tahun yang sama. Pada tahun 1996, tugas dari *EO* ini digantikan oleh *Sandline International*, sedangkan untuk pengamanan pelabuhan pada tahun 1991 pemerintah Sierra Leone menunjuk *Specialist Services International*, dan dalam pengamanan daerah penangkapan ikan, maupun pengumpulan pajak penangkapan ikan pemerintah Sierra Leone menggunakan jasa dari *Marine Protection Services* di tahun 1992.²¹ Sementara itu perusahaan-perusahaan pertambangan

turut mempergunakan jasa dari perusahaan militer atau keamanan swasta untuk pengamanan fasilitas pertambangan, sejumlah *PSC* atau *PMC* yang dipergunakan antara lain *Special Protection Services, Frontline Security Services, Control Risks Group Group 4, DSL, LifeGuard Management, Teleservices International, Cape International Corporation*.²²

Privatisasi kemudian mendorong perkembangan *PSC* atau *PMC* yang berbasis di benua ini. Kepemilikan lokal atas *PMC* atau *PSC* ini selain menjadi simbol politik juga menjadi sumber keuntungan bagi sejumlah politisi yang duduk dalam pemerintahan. Di Afrika Selatan saja tercatat ada 6.000 *PMC* atau *PSC* yang terdaftar dalam *Security Officers Boards*.²³ Kemudian, di negara seperti Angola telah terdapat 90 *PSC*. Dari keseluruhan *PSC* atau *PMC* yang terdapat di negara tersebut, terdapat 2 *PMC* atau *PSC* terbesar yaitu *Teleservices* dan *Alpha 5*. *Telerservices* memiliki keahlian dalam pengamanan daerah pantai, terutama untuk penambangan minyak, sedangkan *Alpha 5* menawarkan jasa perlindungan bagi daerah pertambangan berlian.

Dalam membahas mengenai penyebab terjadinya privatisasi konflik Sierra Leone tidak cukup bila hanya menganalisisnya dari segi dinamika internasional, karena konteks domestik negara tersebut akan turut mempengaruhi perumusan kebijakan penggunaan *PSC* atau *PMC* untuk menangani konflik yang terjadi. Peter Gourevitch menyatakan perlunya menjelaskan interaksi antara politik domestik dengan internasional, dalam interaksi dapat dilihat bagaimana aspek domestik dapat membentuk respon

kebijakan dari sebuah negara, serta interaksinya dengan politik internasional dan kekuatan transnasional.²⁴ Pada bagian berikut ini penulis akan membahas mengenai konteks domestik yang menyebabkan privatisasi konflik Sierra Leone. Variabel-variabel yang akan dipergunakan untuk menjelaskan mengenai kondisi politik internal suatu negara adalah tipe regime dan pola koalisi.

Tipe Regime

Sierra Leone merupakan negara dengan pemerintahan otoritarian. Karakteristik regime Sierra Leone ini secara historis bersumber dari kebijakan destruktif pemerintahan Presiden Siaka Stevens (1968–1985) yang menjadikan pemerintahan Sierra Leone sebagai regime otoritarian. Kebijakan Stevens ini kemudian diteruskan oleh Presiden Joseph Momoh yang berkuasa tahun 1985 sampai 1992.²⁵ Presiden Siaka Steven mengubah sistem multipartai yang ada di Sierra Leone menjadi sistem partai tunggal sejak tahun 1978, melarang adanya partai oposisi dan menggunakan langkah-langkah koersif untuk menentang lawan politiknya.²⁶

Secara politis Sierra Leone yang terpolarisasi ke dalam garis etnis. Dua kelompok etnis utama yang menjadi mayoritas di Sierra Leone yaitu Mende yang mendominasi wilayah selatan dan timur, dan Temne yang berada di wilayah utara. Masing-masing etnik ini memiliki porsi 30% dari total penduduk.²⁷ Kedua kelompok etnis ini membentuk dua partai politik utama. Untuk memenangkan pemilihan umum, aliansi juga dibangun dengan sejumlah kelompok minoritas yang berada di luar kelompok etnis utama. *Sierra*

Leone People's Party (SLPP) menjadi partai yang mewakili kelompok selatan dengan pendukung utama etnik Mende sedangkan *All Peoples' Congress (APC)* memiliki basis dukungan utamanya dari utara, terutama dari kelompok etnik Temne, selain itu etnik lainnya yang membentuk koalisi dalam partai APC juga terdiri atas kelompok etnik Limba, Krio dan juga Kono.²⁸

Pemerintah berupaya untuk mendapatkan dukungan dari kelompok etnik maupun para pemimpinnya, agar dapat mencapai tujuan ini maka birokrasi negara dipergunakan untuk memanipulasi sumberdaya. Negara memiliki struktur birokrasi yang besar namun lemah dan tidak efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Strategi koersif menjadi pilihan kebijakan dan kontrol sosial tetap berada di tangan para kepala suku yang terkait erat dengan loyalitas masyarakat.²⁹ Salah satu cara untuk mendapatkan loyalitas dari kepala suku adalah melalui hasil pertambangan berlian yang dimiliki Sierra Leone. Oleh karena itu Presiden Siaka Stevens yang memerintah sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1985 mempergunakan pemberian kontrol sekaligus pembebasan pajak atas daerah pertambangan berlian bagi kelompok-kelompok yang mendukungnya.³⁰ Pada masa pemerintahan Joseph Momoh penurunan pendapatan dari sektor berlian menyebabkan pemerintahan yang berkuasa tidak mampu mempertahankan hubungan patron yang telah terbentuk sejak masa Presiden Siaka Stevens. Presiden Momoh berupaya untuk mendapatkan kembali kontrol atas pertambangan berlian dari politisi-politisi yang berasosiasi dengan Siaka Stevens karena ia ingin mendatangkan perusahaan-perusahaan

asing baru untuk berinvestasi di sektor pertambangan berlian, selain itu penguasaan atas wilayah-wilayah pertambangan berlian menjadi syarat kunci bagi kreditor untuk memberikan pinjaman bagi Sierra Leone.³¹

Sebuah konsorsium pertambangan kemudian mengajukan proposal investasi skala besar dalam operasi pertambangan berlian kimberlite. Akan tetapi wilayah pertambangan harus terlebih dahulu diamankan dari kelompok-kelompok bersenjata. Sebagai respon atas desakan ini maka Presiden Momoh memerintahkan angkatan bersenjata Sierra Leone untuk menjalankan kebijakan "*Operation Clean Sweep*" dan "*Operation Clear All*" pada pertengahan tahun 1990 yang berhasil memindahkan 30.000 penambang dari lokasi pertambangan berlian.³² Walaupun tidak ada bukti yang membenarkan kaitan antara kebijakan operasi militer Momoh untuk mengamankan daerah pertambangan berlian dengan serangan RUF. Namun kebijakan Presiden Momoh ini dinilai dapat menimbulkan ancaman bagi kelompok-kelompok bersenjata yang selama ini memiliki akses atas sumber daya berlian.

Keterbatasan kontrol pemerintah dan lemahnya militer menyulitkan pemerintahan Presiden Momoh dalam merespon pemberontakan yang dilakukan oleh RUF. Lebih lanjut, Valentine Strasser yang berhasil meng kudeta Presiden Momoh pada tahun 1992 juga tidak dapat menanggulangi pemberontakan RUF walaupun jumlah anggota angkatan bersenjata Sierra Leone telah ditambah menjadi 6.150 pada tahun 1994-1995.³³ Ketika RUF berhasil menduduki daerah-

daerah yang vital, seperti lokasi-lokasi pertambangan dan ibukota negara, pemerintah Sierra Leone memilih untuk menggunakan *PMCs/PSCs*.

Dalam, pengambilan keputusan mengenai penggunaan *PMCs/PSCs* dalam konflik, baik penggunaan *Gurkha Security Group (GSG)* pada awal tahun 1995, dan *Executive Outcome* yang mulai beroperasi bulan Maret 1995 oleh pemerintahan Strasser, maupun *Sandline International* yang mulai beroperasi pada tahun 1997 di masa kepemimpinan Presiden Kabbah, pemimpin eksekutif negara menjadi aktor yang menentukan kebijakan sebab kekuatan sosial yang ada tidak terorganisasi dengan baik dan matang. Selain itu, kekuasaan formal tidak terdistribusi di antara insitansi-insitansi yang independen sehingga kebijakan penggunaan *PSCs/PMCs* yang diimplementasikan bukan merupakan hasil perdebatan antara kepentingan publik dengan swasta. Perumusan kebijakan sebagian besar ditentukan oleh pemimpin politik yang berkuasa. Karena jejaring kebijakan Sierra Leone tidak berpusat pada masyarakat maka publik tidak ikut memutuskan apakah kebijakan yang diambil oleh negara sesuai dengan aspirasi masyarakat atau tidak.

Pola Koalisi

Penjelasan mengenai pola koalisi menurut Gourevitch akan mencakup tipe dan komposisi elit-elit yang dominan, serta jumlah orang yang memegang *power*. Pola koalisi yang terbentuk dalam penggunaan *Executive Outcome (EO)* dalam konflik di Sierra Leone merupakan campuran antara elit pemerintah, kelompok etnik dan

kelompok swasta. Michael Grunberg, Eksekutif perusahaan pertambangan *Branch Energy*, berperan sebagai pihak perantara bagi *EO* dengan pemerintah Sierra Leone. Tony Buckingham, Pemimpin *Branch Energy*, juga membantu menegosiasikan kontrak antara *EO* dengan pemerintahan Strasser.³⁴ *EO* diberikan tanggung jawab untuk menyediakan 150 sampai 200 tentara yang dipersenjatai secara lengkap, termasuk dengan dukungan helikopter untuk mendukung, melatih dan membantu tentara nasional Sierra Leone dalam perang melawan RUF.³⁵ Pembayaran atas jasa *EO* menurut kesepakatan dapat dilakukan secara kredit, limapuluh persen dari pembayaran dapat diberikan oleh pemerintah Sierra Leone setelah lokasi pertambangan Sierra Rutile dioperasikan kembali.³⁶ Dalam penggunaan *EO*, kelompok Kamajors, yang merupakan bagian dari etnik Mende menjadi bagian dari koalisi untuk melawan RUF. Kelompok Kamajors berasal dari tenggara Sierra Leone, *rural militia* ini mengetahui dengan baik medan pertempuran dan menjadi sumber intelijen. *EO* kemudian memberikan latihan militer dan mempersenjatai kelompok Kamajors sehingga kelompok ini menjadi kekuatan militer yang signifikan dan berperan penting dalam pertempuran untuk mendapatkan wilayah Kono. Keberhasilan operasi militer *EO* memfasilitasi pemberian konsesi berlian sebesar \$3 miliar kepada *Branch Energy*.³⁷ Setelah *EO* berhasil memukul mundur pemberontak dari wilayah pertambangan, pemerintah Sierra Leone memberikan konsesi berlian dalam jangka waktu 25 tahun kepada perusahaan *Branch Energy*.³⁸ Konsensi berlian jangka panjang ini berhasil didapatkan ketika

Branch Energy berada di masa kepemimpinan Tony Buckingham.

Berkembang dugaan bahwa *Branch Energy* merupakan pihak yang membayar pengeluaran dari penggunaan EO di Sierra Leone karena pemerintah Sierra Leone hanya membayar \$15.7 juta dari biaya total sebesar \$35.2 juta.³⁹ Dugaan ini diperkuat dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Reginald Glover, Menteri Pertambangan Sierra Leone yang diperintahkan untuk memberikan konsesi berlian kepada Tony Buckingham dan perusahaannya.

*Menurut perintah yang diberikan EO memasuki wilayah Sierra Leone untuk membantu pemerintah dalam berperang melawan pemberontak RUF, sehingga hasil tambang menjadi alat pembiayaan yang diperlukan untuk perdamaian*⁴⁰

Setelah *Executive Outcome* meninggalkan Sierra Leone, *Armed Forces Revolutionary Council (AFRC)* meng kudeta pemerintahan Presiden Kabbah. Pemimpin AFRC Mayor Johnny Paul Kormoh mengajak RUF untuk bergabung dan mengangkat pemimpin RUF Foday Sankoh sebagai wakilnya. Dalam kondisi ini Presiden Kabbah memutuskan menggunakan jasa *PMCs/PSCs* untuk mengembalikan kekuasaan politiknya.

Penggunaan *Sandline International* di Sierra Leone ini kembali ditentukan oleh koalisi yang terbentuk antara pemerintah Sierra Leone di bawah kepemimpinan Presiden Kabbah dengan kepentingan pertambangan. *Sandline International* merupakan perusahaan militer atau keamanan yang berbasis di Inggris. Perusahaan militer atau keamanan ini memiliki afiliasi dengan perusahaan

pertambangan seperti, *Diamond Works* dan *Branch Energy*, maupun perusahaan militer atau keamanan lainnya seperti *Lifeguard* dan *Executive Outcomes*.

Pada saat terjadi kudeta terhadap pemerintahan Presiden Kabbah pada tahun 1997, Presiden Kabbah meminta bantuan dari kelompok investor yang memiliki kepentingan pertambangan di Sierra Leone. Sebagai perwakilan dari kelompok kepentingan pertambangan di Sierra Leone, Rakesh Saxena pemilik perusahaan pertambangan *Jupiter Mining Company* menjadi penghubung antara pemerintah Sierra Leone dengan *Sandline International*.

Insentif yang kembali diminta oleh kelompok kepentingan pertambangan kepada pemerintahan Kabbah adalah konsesi pertambangan berlian dan barang tambang lainnya dari presiden Kabbah. Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan antara Tim Spicer yang menjabat sebagai pemimpin *Sandline* dengan sejumlah Menteri yang duduk dalam kabinet pemerintahan Kabbah. Dalam jangka waktu sebulan setelahnya Spicer mengkomunikasikan rencana *Sandline* kepada Presiden Kabbah akan tetapi rencana ini tidak mendapatkan respon yang cepat dari pemerintahan Kabbah. Hal ini turut disebabkan oleh penandatanganan perjanjian di Conarky yang mengharuskan agar pemerintahan junta militer mengembalikan *power* kepada Presiden Kabbah pada bulan April 1998.⁴¹ Akan tetapi perkembangan politik domestik di Sierra Leone tidak menunjukkan itikat baik dari kelompok militer AFRC akan mengembalikan kekuasaan Presiden Kabbah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada tanggal 23

Desember 1997, Presiden Kabbah akhirnya kembali berunding dengan Tim Spicer untuk membicarakan rencana penggunaan *Sandline* dalam menangani konflik yang terjadi di Sierra Leone. Hasil pertemuan antara Spicer dan Kabbah menghasilkan dua kontrak yang berbeda, yaitu:⁴²

1. Kontrak pertama merupakan *Memorandum of Understanding* antara Presiden Kabbah atas nama Republik Sierra Leone dengan Rakesh Saxena, yang mewakili *Blackstone Capital Corporation of Belize*. Berdasarkan kontrak dengan *Blackstone* ini maka pemerintah Sierra Leone harus memberikan konsesi pertambangan, sebagai syarat penerimaan bantuan ekonomi dan sebagainya yang bernilai \$10 juta.
2. Kontrak kedua merupakan tambahan dari *Memorandum of Understanding* yang diberikan judul '*Military Annex*'. Kontrak kedua menjabarkan bahwa misi utama dari *Sandline* adalah untuk memobilisasi dan membentuk pasukan dengan persenjataan tempur yang baik untuk mengembalikan pemerintahan Kabbah ke Sierra Leone. Nilai dari kontrak ini mencapai angka \$10 juta, berdasarkan kesepakatan kontrak maka *Sandline* mendukung kembalinya pemerintahan Kabbah dengan menyediakan logistik militer, pengetahuan teknis dan berbagai peralatan militer lainnya, menyediakan rancangan operasi militer, melakukan rekrutmen serta menjalankan operasi yang telah direncanakan, serta melakukan pengadaan senjata. Agar dapat melakukan pengadaan senjata dalam jumlah besar maka Presiden Kabbah kemudian menandatangani sertifikat *end-user* untuk memastikan agar

senjata dan amunisi ditujukan untuk keperluan pemerintah dan hanya akan dipergunakan di wilayah Sierra Leone. Sesuai dengan sertifikat tanggal 15 Januari 1998 dan daftar produk yang dipesan, maka jenis senjata yang didatangkan meliputi 2,500 senapan, 180 pelontar roket, 50 senjata mesin dan sejumlah besar amunisi.

Sebagai bentuk realisasi dari kontrak dengan pemerintah Sierra Leone, pada tanggal 23 Februari 1998, *Sandline* melakukan pengapalan 35 ton senjata dan amunisi.⁴³ *Sandline* mengatur pembelian 35 ton senjata dan amunisi dari Bulgaria untuk keperluan ECOMOG yang kemudian disuplai untuk keperluan kelompok milisi di Sierra Leone.⁴⁴ Pada pertengahan bulan Februari 1998, Freetown dapat diamankan dari pendudukan kelompok pemberontak. Setelah itu, wilayah-wilayah pertambangan seperti Bo, Kenemo dan Zummi pun berhasil direbut kembali.⁴⁵ Kekuasaan Presiden Kabbah berhasil dipulihkan kembali pada bulan Maret 1998. Setelah berhasil mengambil kembali kekuasaannya sebagai Presiden Sierra Leone, Presiden Kabbah memulai demobilisasi seluruh angkatan bersenjata. Pengadilan militer maupun pengadilan sipil diselenggarakan untuk menghukum individu-individu yang berasosiasi dengan AFRC atau RUF. Hukuman mati diputuskan oleh pengadilan militer atas 24 anggota militer sedangkan pengadilan sipil memvonis mati 47 orang.⁴⁶

KESIMPULAN

Dalam menganalisa penyebab privatisasi konflik yang terjadi di suatu negara selain harus melihat ketiga kondisi dinamika

internasional seperti kesenjangan yang terjadi dalam *military market*, transformasi hakekat perang, dan perkembangan norma privatisasi, konteks domestik negara yang melakukan privatisasi konflik ini juga harus diperhitungkan. Bagi negara Sierra Leone kesenjangan dalam *market security* yang sangat mempengaruhi negara ini adalah rendahnya kapabilitas militer dan penurunan intervensi eksternal yang berdampak pada perubahan *balance of power* lokal.

Poin berikutnya berkaitan dengan transformasi hakekat perang. Transformasi kunci yang menyebabkan Sierra Leone mengambil kebijakan privatisasi konflik adalah terjadinya kriminalisasi konflik. Dengan otoritas negara yang lemah maka aktor-aktor ilegal yang terlibat dalam penyelundupan berlian maupun senjata kecil dan ringan dengan mudah melakukan penetrasi ke dalam wilayah negara.

Dinamika internasional perkembangan norma privatisasi di kawasan Afrika berlangsung karena sejumlah besar negara memiliki kebutuhan keamanan dan militer untuk menjaga stabilitas internal negaranya namun memiliki kapabilitas yang jauh dari memadai.

Interaksi antara dinamika internasional dengan politik domestik negara pada akhirnya mendorong negara untuk memilih kebijakan penggunaan *PSCs/PMCs* yang dirumuskan negara. Dalam negara dengan tipe rezim otoritarian seperti Sierra Leone, opini publik bukan hal yang penting. Kebijakan diputuskan oleh pemimpin politik yang didukung oleh kelompok kepentingan swasta maupun pemimpin etnik tertentu

yang memiliki hubungan patron-klien dengannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arts, Robert G. dan Robert Jervis. *International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues*, 7th edition. New York: Longman.2005.

Avant, Deborah D. *The Market for Forces: Consequences of Privatizing Security*. Cambridge: Cambridge University Press.2005.

Ayissi, Anatole dan Robin Edward Poulton. *Bound to Cooperate: Conflict, Peace and People in Sierra Leone*. UNIDIR: Geneva. 2000.

Hall, Rodney Bruce dan Thomas J. Biersteker. *The Emergence of Private Authority in Global Governance*. Cambridge: Cambridge University Press. 2002.

Carlsnes, Walter, Thomas Risse dan Beth A (eds.). *Handbook of International Relations*. London: Sage Publications. 2005.

Howe, Herbert M. *Ambiguous Order: Military Forces in African States*. Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc. 2001.

Katznelson, Ira dan Helen V. Milner (eds). *Political Science: State of Discipline*. W.W. Norton & Co. Inc. 2002.

Rotberg (ed.). Robert I. *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*. Washington D.C.: Brooking Institution Press. 2003

Shearer, David. *Private Armies and Military Intervention*. New York: Oxford University Press. 1998.

Singer, P.W. *Corporate Warriors: The Rise of Privatized Military Industry*. Ithaca: Cornell University Press

Jurnal

Parameters: U.S. Army War College Quarterly, Spring 1999, vol. XXIX, no. 1, (U.S. Army War College, 1999)

International Organization Volume 32, Autumn 1978

International Organization, Volume 54, Number 1, Winter 2000

International Security, vol. 26, no.3, winter 2001/2002

Orbis, Fall 2004

Policy Review, June & July 2003

Conflict, Security, Development Journal, (London Centre for Defense Studies, Kings College London, 2002)

Survival, Volume 46, Issue 1, Spring

Internet

www.anselm.edu/NR/rdonlyres/CFA16C8E-F103-4C2C-B362-B89BBF98842F/6305/paper1ballard1.pdf

www.armscontrolcenter.org/resources/20051010_risks_in_iraq.pdf

www.au.af.mil/au/awc/awcgate/ssi/stratrm_a.pdf

www.aug.edu/~sbajmb/paper-cria.PDF

www.basicint.org/pubs/Research/2004PMC.htm

www.brookings.edu/views/articles/fellows/singer20040122.pdf

www.brookings.edu/fp/saban/analysis/20060215_iraqreport.pdf

www.ciaonet.org/wps/mob21/mob21.pdf

www.csae.ox.ac.uk/conferences/2004-BB/papers/Krasner-CSAE-BB2004.pdf

www.commondreams.org/headlines03/1210-13.htm

www.columbia.edu/~jpk2004/Weisiger.pdf

www.crisisgroup.org/home/index.cfm

www.cda-cdai.ca/symposia/2004/Smith,%20Richard-%20Paper.pdf

www.cns.miis.edu/pubs/npr/vol06/63/eriks_s63.pdf

www.dcaf.ch/docs/occasional_6.pdf

www.duke.edu/~grieco/Grieco_Second_Opinion.pdf

www.defencejournal.com/2000/sept/military.htm

www.democrats.reform.house.gov/Documents/20050728120807-53687.pdf

www.eis.bris.ac.uk/~poxek/Krahmann%20European%20Security.pdf

www.evakreisky.at/onlinetexte/pm.pdf

www.fpc.state.gov/documents/organization/44132.pdf

www.fco.gov.uk/Files/kfile/mercenaries.0.pdf

www.fpc.org.uk/fsblob/271.pdf

www.fco.gov.uk/Files/kfile/report.pdf

www.kommunikationswissenschaftlerfurt.de/personen/.../personen/27574.html

www.gainesjunction.tamu.edu/issues/vol3num1/jdormont/jdormont.pdf

www.globalcalliraq.org/en/node/431

www.gwu.edu/~iar/WS02_Perez-Katz.pdf

www.globalpolicy.org/security/peacekpg/training/1029private.htm

www.worldpolicy.org/projects/arms/updates/081203.html

www.globalsecurity.org/military/library/report/2001/pmc-legitimate-entity.pdf

www.govinfo.library.unt.edu/nssg/Reports/NWC.pdf

www.indiana.edu/~tisj/readers/full-text/15-4%20cronin.pdf

www.ips-dc.org/iraq

www.isn.ethz.ch/pubs/ph/details.cfm?lng=en&id=14077

www.ipacademy.org/PDF_Reports/BGG_report.pdf

www.ipacademy.org/PDF_Reports/Good_company.pdf

www.irc-online.org/pdf/papers/PR0508ravel

www.iss.co.za/pubs/ASR/7No4/AfricaWatch.html

www.iwar.org.uk/rma/resources/rma/98-E-27.pdf

www.kairoscanada.org/e/resources/GEJR%20Fall%202003%20low%20res.pdf

www.lexingtoninstitute.org/docs/521.pdf

www.newrules.org/voice2004/

www.opendemocracy.net/globalization/potomac_3127.jsp

www.oxfordresearchgroup.org.uk/publications/paulrogers/June05.pdf

www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1657/-27k-

www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1029/MR1029

www.reliefweb.int/library/documents/2001/icg-sie-11apr.pdf - 328k -

www.rpc.senate.gov

www.sipri.org/contents/milap/milex/aprod/privatization.pdf

www.sierra-leone.org/SAS-final.pdf

www.sgir.org/conference2004/papers/Choi_nacki%20-%20Anything%20new.pdf

www.thsoa.org/hy01/11_1.pdf

www.topsy.org/contractors.html

www.twq.com/02summer/chege.pdf

www.unitedforpeace.org/downloads/PWRecruitSection.pdf

www.globalsecurity.org/military/world/pa-ra/pmc-list.htm

www.worldpolicy.org/projects/arms/news/brown.pdf

www.web.mit.edu/cis/pdf/Audit_6_05_Williams.pdf

www.pacweb.org/e/pdf/heart%20of%20the%20matter.doc

www.wws.princeton.edu/ppns/conferences/reports/privtranscript.pdf

CATATAN BELAKANG

¹ Christopher Coker, "Outsourcing War", dalam, Daphne Josselin and William Wallace, (eds.). *Non State Actors in World Politics* (New York: Palgrave, 2001), hlm. 194.

² Thomas K. Adams, "The New Mercenaries and the Privatization of Conflict," *Parameters: US Army War College Quarterly*, Spring 1999, Vol. XXIX, No. 1 (US Army War College: 1999), hlm. 106.

³ David Shearer, *Private Armies and Military Intervention*, (New York: Oxford University Press, 1998), hlm. 23-24.

⁴ Deborah D. Avant, *The Market for Forces: Consequences of Privatizing Security*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 21.

⁵ Deborah D. Avant, *Ibid.*, hlm. 26.

⁶ P.W. Singer, *Corporate Warriors: The Rise of Privatized Military Industry*, (Ithaca: Cornell University Press), hlm. 49-69.

⁷ Peter Gourevitch, "The Second Image Reversed: The International Sources of Domestic Politics,"

International Organization, Vol. 32, (Autumn 1978), hlm. 900-905.

⁸ Herbert M. Howe, *Ambiguous Order: Military Forces in African States*, (Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc., 2001), hlm. 188.

⁹ *Ibid.*, hlm. 189.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 191.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 191.

¹² Herbert M. Howe, *Op.Cit.*, hlm. 78.

¹³ P.W. Singer, *Op.Cit.*, hlm. 8-14.

¹⁴ P.W. Singer, *Corporate Warriors: The Rise of Privatized Military Industry*, *Op.Cit.*, hlm. 49.

¹⁵ Richard Cornwell Head Operational African Security Information Service (OASIS) Institute for Security Studies, "Sierra Leone: RUF Diamonds?", dalam *African Security Review* Vol 7 No 4, 1998. www.iss.co.za/pubs/ASR/7No4/AfricaWatch.html, diakses pada tanggal 10 Mei 2006 pukul 19.00 WIB.

¹⁶ "Sierra Leone: The Forgotten Crisis Report to the Minister of Foreign Affairs," the Honourable Lloyd Axworthy, P.C., M.P. from David Pratt, M.P., Nepean-Carleton, Special Envoy to Sierra Leone, April 23, 1999, <http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1999/crisis-e.htm>, diakses pada tanggal 10 Mei 2006 pukul 19.20 WIB.

¹⁷ *The Military Balance*, The International Institute for Strategic Studies, (London: Oxford University Press, 1989-2006), *Op.Cit.*

¹⁸ Eric G. Berman, "Re-Armament in Sierra Leone: One Year After the Lome Peace Agreement," www.sierra-leone.org/SAS-final.pdf - 729k - *op.cit.* diakses pada tanggal 19 Mei 2006 pukul 20.45 WIB.

¹⁹ Richard Cornwell, *Op.Cit.*

²⁰ Ana M. Perez-Katz, *The Role of Conflict Diamonds in Fueling Wars in Africa: The Case of Sierra Leone*, *International Affairs Review*, www.gwu.edu/~iar/WS02_Perez-Katz.pdf, diakses pada tanggal 10 Mei 2006 pukul 17.50 WIB

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 191.

²³ Honourable House of Commons, "Private Military Companies: Options for Regulation", Paper yang diterbitkan 12 Februari 2002, *Op.Cit.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Peter Gourevitch, *Domestic Politics and International Relations*, dalam *Handbook of International Relations*, Walter Carlsnes, Thomas Risse and Beth A (eds.) (London: Sage Publications, 2005), hlm. 309.

²⁶ Michael Chege, "Sierra Leone: The State that Came Back from the Dead," *The Washington Quarterly*, Summer 2002, diakses dari

www.twq.com/02summer/chege.pdf - 79k - V pada tanggal pada tanggal 20 Mei 2006 pukul 18.00 WIB.

²⁶Joe A. D. Alie, "Background to the Conflict (1961-1991)", dalam *Bound to Cooperate: conflict, Peace and People in Sierra Leone*, Anatole Ayissi and Robin Edward Poulton, (eds.). (UNIDIR: Geneva, 2000), hlm. 18.

²⁷Christopher Clapham, Lancaster University, "Sierra Leone: The Global-Local Politics of State Collapse and Attempted Reconstruction," Failed States Conference, Florence, 10-14 April 2001 diakses dari www.ippu.purdue.edu/failed_states/2001/papers/CLAPHAM2.pdf - 95k -, diakses pada tanggal 10 Mei 2006 pukul 20.00 WIB

²⁸*Ibid.*

²⁹Deborah D. Avant, *Market for Force, Op.Cit.*, hlm. 83.

³⁰*Ibid.*, hlm. 83.

³¹William Reno, dalam Robert I. Rotberg (ed.), *State Failure and State Weakness in a Time of Terror* (Washington D.C.: Brooking Institution Press, 2003), hlm. 85.

³²*Ibid.*, hlm. 86.

³³The Military Balance, *Op.Cit.*

³⁴Ian Smillie, Lansana Gberie, & Ralph Hazleton, "The Heart of the Matter: Sierra Leone, Diamonds and Human Security," <http://www.pacweb.org/e/pdf/heart%20of%20the%20matter.doc>

³⁵Deborah D. Avant, *The Market for Force, Op.Cit.*, hlm. 86.

³⁶*Ibid.*, hlm. 86.

³⁷Herbert M. Howe, *Ambiguous Order, Op.Cit.*, hlm. 206.

³⁸Ian Smillie, Lansana Gberie, & Ralph Hazleton, *Op.Cit.*

³⁹Herbert M. Howe, *Ambiguous Order, Op.Cit.*, hlm. 206.

⁴⁰Ian Smillie, Lansana Gberie, & Ralph Hazleton, *Op.Cit.*

⁴¹Sir Thomas Legg KCB QC & Sir Robin Ibbs KBE, "Return to an Address of the Honourable the House of Commons dated 27 July 1998 for the Report of the Sierra Leone Arms Investigation," Ordered by the House of Commons to be printed 27th July 1998, London: The Stationery Office, diakses dari www.fco.gov.uk/Files/kfile/report.pdf - 283k - pada tanggal 20 Mei 2006 pukul 20.15 WIB

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Major S. Goddard, MAJ, RA INF, Australia, "The Private Military Company: A Legitimate International Entity Within Modern Conflict," A thesis presented to the Faculty of the U.S. Army Command and General Staff College in partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Military Art and Science, General Studies, diakses dari www.globalsecurity.org/military/library/report/2001/pmc-legitimate-entity.pdf - pada tanggal 15 Mei 2006 pukul 18.45 WIB

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Deborah D. Avant, *The Market for Force, Op.Cit.*, hlm. 95.